

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Peristiwa sejarah adalah hasil rekonstruksi dari para pemenang pada masanya. Mereka dianggap berhak menjadi tokoh utama, sehingga lawan politiknya berpeluang menjadi sasaran untuk disubordinasikan. Cara tersebut bisa dijustifikasi guna meningkatkan eksistensi dari aktor utama dalam peristiwa sejarah yang dirasakan oleh khalayak umum. Karena untuk memperkuat legitimasinya, tentu seseorang tersebut harus menjadi satu-satunya yang dianggap memiliki kekuasaan oleh masyarakatnya.

Mulainya Orde Baru menjadi penanda Presiden Soeharto mengukir kisahnya dalam sejarah Indonesia. Keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 memandatkan Presiden Soeharto untuk melanjutkan pemerintahan Indonesia dalam merespon kasus 30 September Partai Komunis Indonesia 1965 (Nugroho.1984). Namun, untuk memperkuat eksistensinya tentu ada beberapa problematik yang menjadikan beliau harus memiliki strategi yang tepat dalam legitimasinya. Selama menjabat ada dua cara untuk memperlemah posisi lawan politiknya (Agus.1998).

Cara pertama ialah menjalankan mekanisme legal dengan melakukan represifitas terhadap oknum oposisi yang didukung oleh perangkat hukum yang berlaku. Cara ini bertendensi otoriter sehingga seringkali kurang diterima baik oleh masyarakat. Sedangkan, cara kedua ialah melakukan delegitimasi terhadap

lawan politiknya dengan memproduksi dan memanipulasi demi melemahkan nama mereka melalui surat kabar, majalah, dan bentuk lainnya yang beririsan dengan masyarakat.

Periode awal Orde Baru, lawan politik terbesar dari Presiden Soeharto ialah Presiden Soekarno. Sebagai presiden sebelumnya, nama Presiden Soekarno masih melekat kuat di dalam pikiran masyarakat Indonesia. Selain namanya, gagasan dan idenya juga masih aktif digunakan oleh Masyarakat dalam berbagai aspek. Bahkan beberapa Masyarakat yang masih menjadi pendukung Soekarno masih berusaha untuk menyebarluaskan pengaruh Soekarno dan mempertahankannya.

Namun sayangnya, akibat dari peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia 1965, kedua aktor tersebut yaitu Soekarno dan Soeharto terus bergelut pada ajang dualisme kepemimpinan. Keduanya sama-sama berusaha mempertahankan citra baiknya agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan dan ketertarikan kepada mereka. Dualisme kepemimpinan dimainkan sangat kuat oleh Presiden Soeharto. Sebagai aktor yang memiliki kekuatan dibidang militer, Soeharto tampil dengan keberanian dan ketegasannya dimasyarakat. Aktor baru yang berusaha masuk dalam turbulensi masyarakat yang berusaha mengendalikan kepercayaan mereka terhadap dirinya. Cara efektif yang beliau pilih ialah memarginalkan peran-peran Soekarno agar masyarakat mulai melupakan beberapa hal baik yang pernah terjadi di Orde Lama.

Proses DeSoekarnoisasi menjadi menarik untuk dikaji, mengingat Soekarno memiliki pengaruh yang besar terhadap bangsa Indonesia. Proses ini perlahan melenyapkan pengaruh beliau dari sejarah Indonesia. Ketika proses ini dijalankan, artinya akan ada peluang bagi masyarakat selanjutnya tidak mengetahui apa saja kontribusi yang dihasilkan oleh Soekarno. Atau di sisi terburuknya, bisa saja mereka tidak mengenal siapa Soekarno. Padahal, idealnya masyarakat harus kenal pendiri bangsa serta seminimalnya tahu perannya terhadap bangsa Indonesia. Bahkan, ide dan gagasan yang dibangun sejak Indonesia merdeka layak untuk diingat dan menjadi pembelajaran untuk masa kini serta masa depan.

Strategi delegitimasi terhadap Presiden Soekarno dilakukan dimulai ketika ada peristiwa keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 sampai beliau wafat yaitu 1970. Peristiwa pemberontakan PKI, menjadi titik awal masyarakat mulai menurun kepercayaan terhadap Presiden Soekarno karena beliau dianggap turut andil terhadap peristiwa tersebut. Kedekatannya dengan PKI serta oknum yang teridentifikasi sebagai pelaku membuat Presiden Soekarno menjadi sasaran amarah masyarakat karena tidak mampu mengendalikan atau menghukum para pelaku. Namun proses ini terlihat sangat kuat di tahun 1966, karena peran Soeharto sudah legal berdasarkan landasan hukum dan Surat Perintah yang diberikan oleh Soekarno. Sedangkan, tahun 1970 dirasionalisasikan sebagai tahun beliau wafat. Maka proses ini mulai dikurangi karena Presiden Soeharto mau berusaha menghadirkan keseimbangan lagi agar beliau tetap menjadi aktor yang baik dimata masyarakat.

Cara menyubordinasikan yang sangat jelas pada masa itu ialah melalui pers yang tersebar di masyarakat. Padahal dunia ideal dari lembaga pers haruslah bersifat netral dan tidak memihak elemen manapun. Kode etik jurnalistik masa Orde Baru memuat pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 mengenai penerapan hal-hal yang perlu dijadikan prinsip bagi setiap pers. Pasal ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan pokok bagi pers dan pengamanann cetakan harian yang terbit secara berkala. Peraturan diantaranya ialah harus adanya independensi lembaga, menguji mengenai informasi yang akan diberikan ke masyarakat umum, tidak memuat berita bohong, dan tidak menyalahgunakan profesi tersebut untuk berita bohong, fitnah, dan cabul (Tebba.2005).

Pers Orde Baru merupakan kumpulan berita yang beredar pada masa Orde Baru sekitar 1966 sampai 1998. Ada beberapa pers yang sudah muncul dari sebelum Orde Baru dan ada yang sempat dibredel pada masa Orde Lama kemudian terbit kembali dimasa Orde Baru. Namun, di awal berdirinya Orde Baru beberapa pers di Indonesia memiliki arah implisit untuk melakukan proses delegitimasi terhadap Presiden Soekarno. Dendam akibat pembredelan seperti koran Sinar Harapan serta ada yang ditulis oleh beberapa aktor yang dekat dengan Soeharto. Perubahan warna politik Indonesia dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin sangat berimbas pada kehidupan pers (Asy'ari, Hasyim.2009). Sistem politik yang represif dan otoriter saat itu mendorong pers memiliki suasana yang tercekam.

Alhasil, ketika awal orde baru kepemimpinan diganti oleh Presiden Soeharto maka beberapa pers mulai merasakan kebebasan kembali. Namun, diantaranya ada yang merasa pers menjadi media balas dendam terhadap Orde Lama dengan memuat berita yang didominasi memperburuk citra Orde Lama. Terbukti dengan adanya kenaikan tiras surat kabar harian maupun mingguan pada tahun 1966 yang disebabkan telah diperbolehkan terbit kembali beberapa surat kabar yang sempat dibredel pada masa Demokrasi Terpimpin seperti *Harian Merdeka*, *Berita Indonesia*, *Indonesian Observer*, dan lainnya. Pembingkai pers yang dimaksud ialah isi konten yang menggambarkan betapa buruknya orde lama dan Soekarno.

Pers masa awal orde baru penuh dengan kebebasan dalam membuat informasi. Kebebasan pers dianggap sebagai mahkota dari Orde Baru. Terbukti dengan adanya perubahan *status quo* dalam Undang-undang Pers tahun 1966 mengenai prinsip dasar Pers yang menjadikan pers sebagai wadah yang tidak dapat disensor dan dikendalikan. Jika sebelumnya hanya beberapa koran saja yang boleh beredar, namun masa awal orde baru memperbolehkan semuanya untuk menulis berita sesuai dengan kaidah yang ada. Beberapa pers yang pernah dibredel masa Orde Lama juga mulai menunjukkan aksinya dengan memuat beberapa berita yang mendukung terbitnya Orde Baru akibat keresahannya yang sempat dibungkam oleh Orde Lama.

Dalam menuju terciptanya dunia yang melupakan ide dan gagasan Presiden Soekarno, lembaga pers mulai diintervensi untuk menghasilkan berita-berita yang bertendensi pada proses DeSoekarnoisasi. Berita yang memuat

dibingkai agar menjadi sebuah turbulensi yang homogen. Analisis pemingkai adalah upaya untuk merekonstruksi sebuah hal agar masyarakat mudah mengingat dan memahaminya (Eriyanto.2002). Dalam hal ini, kita dapat merasakan dan melihat bagaimana media berita membingkai suatu karyanya dalam memaknai sebuah info.

Idealnya, pers haruslah netral dan mengungkapkan fakta sesuai keadaan sebenarnya. Namun, masa Orde Baru menjadikan lembaga independen tersebut justru harus berpihak kepada pemerintah dan membuat berita-berita yang memperburuk citra Orde Lama agar masyarakat semakin benci dengan Orde Lama serta seluruh aktor yang terintegrasi didalamnya. Sedangkan, saat itu peran Presiden Soekarno semakin lemah di masyarakat akibat adanya narasi dualisme kepemimpinan. Sehingga, beliau tidak memiliki pengaruh besar untuk mengkritisi pers yang beredar. Presiden Soekarno hanya bisa diam bahkan pendukungnya turut dilemahkan seperti dilarang adanya gerakan pendukung Soekarno dan lainnya.

Sehingga, penelitian ini akan merekonstruksi proses deSoekarnoisasi melalui Pemingkai pers pada tahun 1966 sampai 1970. Penelitian yang relevan sebelumnya antara lain “De-Soekarnoisasi dan Upaya Legitimasi Politik Orde Baru, 1965-1987” Karya Jelly Vantani yang menjelaskan proses deSoekarnoisasi serta upaya dalam peningkatan eksistensi Orde Baru dan “De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru” karya Agus Sudibyo yang menjelaskan adanya wacana terstruktur dalam melakukan delegitimasi peran Soekarno demi menegakkan politik Orde Baru. Berbeda dengan penelitian

sebelumnya, penelitian ini akan menjelaskan proses deSoekarnoisasi dalam pemingkungan pers tahun 1966 sampai 1970. Penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai pasca keluarnya MPRS pencabutan jabatan Soekarno dalam proses melemahkan beliau yang disusun secara formal dan sistematis melalui pers, Dengan demikian, akan mulai muncul kesadaran bagi mereka bahwa ada beberapa simbolik atau peran Soekarno yang berusaha digantikan atau bahkan dihilangkan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, penelitian ini membatasi masalah dalam temporal (waktu). Waktu yang dipilih ialah tahun 1966-1970 dengan alasan 1966 sebagai tahun keluarnya Surat Perintah 11 Maret sehingga adanya transisi dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto dan 1970 sebagai tahun meninggalnya Presiden Soekarno. Dalam kurun waktu yang dipilih, telah terjadi banyak pemingkungan dalam lembaga pers untuk melakukan subordinasi kepada Soekarno serta pemikirannya pada Orde Lama.

Sedangkan, aspek spasial yang dipilih terbatas pada pers atau media yang merepresentasikan informasi pada masa orde baru. Pers yang dijadikan bahan penelitian juga menyempit pada koran yang memberikan berita secara rutin atau secara harian dan berkala. Berita ini akan terbit setiap harisnya dan rutin setiap waktunya. Berita pers dianggap penting karena dekat dengan masyarakat dan menjadi informasi sentral pada masa Orde Baru. Karena pada saat itu tidak semua Masyarakat bisa mengakses televisi

dan radio, sehingga mereka lebih sering membaca berita harian atau koran. Koran tersebut diantaranya koran *Sinar Harapan*, *Gelora Indonesia*, *Kompas Baru*, dan *Berita Yudha*. Karena keempat koran tersebut sudah merepresentasikan berita pers pada awal orde baru. Selain itu, keempat koran ini memiliki latar belakang yang sama dan berdiri di kota besar seperti Jakarta. Sehingga penyebaran informasinya lebih masif dan intens dalam kemajuannya dan transformasinya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka diajukan perumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana proses DeSoekarnoisasi yang dilakukan selama tahun 1966 sampai 1970 ?
- b. Apa saja isi konten dari koran yang melakukan pembingkaiian DeSoekarnoisasi selama tahun 1966 sampai 1970?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk merekonstruksi DeSoekarnoisasi yang dilakukan oleh pers Orde Baru terutama pada tahun 1966 sampai 1970. Penyusunan akan menggunakan pendekatan ilmu komunikasi berupa pembingkaiian pers dan ilmu politik dalam proses delegitimasi kekuasaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan dan pelengkap sejarah DeSoekarnoisasi masa Orde Baru dalam aspek lembaga pers. Lebih tepatnya, waktu yang akan menjadi kajian dalam pembahasan ialah tahun 1966 sampai 1970.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengayaan dalam pembelajaran ilmu sejarah yang belum dibahas secara umum. Diharapkan juga bisa menjadi bahan pembelajaran mengenai masa Orde Baru di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta.

D. Kerangka Analisis

Suatu negara yang menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya, tentu segala kebebasan menjadi landasan dasar dalam mengilhaminya. Ajang persaingan politik semakin pelik karena kekuatan akan dibangun melalui aktor yang sedang eksis dimasa itu. Tidak heran dalam perkembangan eksistensinya, maka akan beririsan dengan legitimasi dan delegitimasi. Dalam konteks filsafat politik, proses delegitimasi tidak hanya manusia yang menjadi sasarannya namun juga pada gagasan dari orang yang berkaitan.

Proses peningkatan legitimasi orde baru memerlukan wacana yang struktur untuk menggandeng masyarakat agar lebih dekat dengan rezim yang berusaha dibangun. Menurut Eriyanto (2001), Analisis wacana dalam lapangan masyarakat diartikan sebagai pembicaraan yang terbingkai. Wacana yang

dimaksud ialah proses perkembangan dari komunikasi yang dibangun sehingga bisa diinterpretasi dengan mudah oleh masyarakat luas. Media yang digunakan berupa medium yang memuat informasi dan biasa dikonsumsi secara publik.

Dalam penulisan media massa, paradigma yang digunakan ialah kritis. Pemikiran yang bersumber dari Frankfurt ini melandaskan bahwa setiap penulisan berita menjadi sebuah retorika masyarakat dalam memandang realita. Namun setelah teori ini disempurnakan oleh Stuart Hall setidaknya paradigma kritis ini bisa dikaji melalui 3 hal yaitu posisi media, posisi wartawan, dan hasil liputan.

Posisi media dimaksudkan bukan sebagai saluran yang bebas dan netral melainkan sebagai alat dari kelompok dominan untuk menghasilkan sebuah ideologi dominan bagi masyarakat (David.1994).Media menjadi fasilitator untuk kelompok dominan yang sedang berkuasa atau dalam sejarah ialah pemenang untuk memproliferasi eksistensinya di masyarakat. Sehingga media bisa diarahkan secara politik orientasinya tanpa memandang realita sebenarnya. Aktor yang memegang kendali atas arahnya ialah mereka yang dekat dan mempunyai akses untuk berkaitan dengan media tersebut.

Posisi wartawan lebih menekankan dalam pertimbangan fakta yang ada dengan keberpihakan dari media yang digelutinya. Jika pada biasanya wartawan hanya menulis dan melapor apa yang sebenarnya dilihat dan dipahami, namun dalam paradig ini mereka diminta untuk menulis dengan penambahan nilai sesuai dengan ideologi yang dibangun oleh media tersebut.

Sehingga profesionalisme bukan menjadi penekanannya, melainkan harus memandang dari sudut pandang konstruksi sosial yang akan dibangun.

Sedangkan hasil liputan dalam paradigma kritis ialah hasil penulisan yang diliput tidak seharusnya baku dan objektif. Hasil liputan yang ditulis oleh wartawan diperbolehkan untuk mempraktikkan ideologi dari media tersebut dan boleh memarginalkan kelompok lain melalui berita yang ditulis. Karena dalam pandangan bahasa pun tidak bisa sepenuhnya penulisan objektif sehingga akan muncul distingsi antara realitas yang sesungguhnya dengan realitas yang direpresentasikan oleh wartawan (Eriyanto.2001).

Dalam penulisan berita yang mementingkan sebuah ideologi, biasanya dibalut dengan kosakata yang akan mendukungnya. Karena kosakata akan menggambarkan realitas yang ditulis oleh wartawan. Hal ini dibenarkan karena media kritis bertujuan untuk merekonstruksi sebuah pandangan di masyarakat melalui penulisannya. Ada empat kosakata yang digunakan untuk melegitimasi dan mendelegitimasi lawan dalam menstimulus ideologi media tersebut.

Pertama, kosakata untuk membuat klasifikasi. Berdasarkan fakta realitas yang begitu kompleks, maka akan disederhanakan bahasanya melalui abstraksi yang dibangun oleh wartawan. Klasifikasi juga bisa membantu penulis dalam mengontrol berita agar selaras dengan orientasinya. Dan juga membantu pembaca untuk memahami kejadian karena mereka tidak melihat atau merasakan langsung peristiwanya. Sebagai contoh adanya liputan mengenai “pasukan interfeet di Timor Timur yang memborgol, menggeledah, dan menodong masyarakat Timor Timur” bisa disederhanakan dengan

“Pasukan Interfet di Timor Timur yang sedang melakukan tugasnya”. Dari kosakata klasifikasi artinya akan ada intervensi dalam penulisan berita agar mudah dipahami oleh masyarakat bahkan berpikir baik akan sosok yang mau dieksistensi.

Kedua, kosakata untuk membatasi pandangan. Dalam menuliskan suatu peristiwa biasanya wartawan menggunakan kata yang biasanya bisa membuat pembaca menghubungkan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya dengan aktor yang sama. Sebagai contoh “perang antara Islam dan Kristen adanya pembantaian Kristen terhadap mujahidin Islam” bisa diganti dengan “adanya kerusuhan berbau SARA”. Sehingga masyarakat akan memandang kasus SARA yang serupa dan menyambungkannya. Inilah yang menjadikan cara berpikir masyarakat akan membentuk sebuah algoritma yang sama terus menerus.

Ketiga, kosakata dalam pertarungan wacana. Dalam kosakata ini, penulis akan membalut sebuah kata-kata sesuai dengan wacana yang sudah ditentukan. Walaupun yang diwawancara atau diliput memiliki pengakuan kebenarannya sendiri, namun penulisan berita harus disesuaikan agar tetap sesuai wacana yang dibangun sedari awal agar konsisten.

Keempat, kosakata untuk memarjinalisasi. Pemakaian kata yang digunakan biasanya menggunakan kata yang tidak netral sehingga akan memunculkan tendensi dari pikiran pembaca untuk menyudutkan aktor. Sebagai contoh adanya pemberitaan kasus perkosaan bisa digambarkan dengan wanita yang diperkosa oleh pemuda. Walaupun pelaku yang salah, namun akan ada pemikiran bahwa wanita tersebut yang diperkosa juga salah dan berdosa

karena menggunakan pakaian mini atau hal-hal lain yang menjadikan salah persepsi.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji sebuah media yang dekat dengan masyarakat yaitu pers. Sebagai media yang dekat dengan masyarakat, pers menjadi lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial yang memiliki sifat diantaranya dikenal oleh khalayak umum sebagai nama lembaga bukan perorangan (Baso dalam Arifin, Anwar. 2010). Pers dibedakan menjadi dua pengertian yaitu arti luas dan arti sempit (Arifin, Anwar.2010). Dalam cakupan luas, pers direpresentasikan melalui semua barang yang tercetak diantaranya surat kabar, majalah, brosur, bulletin, buku, pamflet, radio, televisi, selebaran, dan spanduk. Sedangkan, dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pers sempit yaitu surat kabar atau koran yang menjadi berita tercetak yang bersifat umum dan aktual.

Biasanya pers memiliki ciri khas yang berbeda tergantung pada orientasi setiap penulisannya. Aktor-aktor yang bergelut di dalamnya sudah pasti menetapkan ideologi dan politiknya sebagai tendensi dalam kepenulisan beritanya. Penggunaan pers di dunia barat sangat memotivasi Indonesia dalam menggunakan surat kabar sebagai alat kekuasaan setiap rezim. Seperti di Inggris pada abad 16-17 yang menjadikan surat kabar sebagai alat pelestarian kekuasannya sehingga menyebarkan doktrin keotoriterannya melalui berita-berita yang akan dikonsumsi oleh masyarakat banyak (Arifin, Anwar.2010).

Menurut Mosco (1996) hal tersebut termasuk dalam konsep ekonomi politik. Dalam arti luas, konsep ini bisa menjadi kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Melalui ekonomi politik, ada tiga konsep penting

diantaranya komodifikasi yang berarti adanya nilai guna yang menjadi nilai tukar dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi berita, spesialisasi yang berarti adanya sinergitas antara kontrol vertikal yang akan memberikan berita pada masyarakat secara horizontal, dan strukturasi yang berarti adanya interpedensi antara aktor didalam berita dengan struktur sosial sehingga bisa mempengaruhi berita yang akan diberikan kepada masyarakat.

Konsep Pembingkai yang akan menjadi landasan penelitian ini ialah konsep Pembingkai oleh Entman. Dalam konsep ini, terdapat dua hal dalam Pembingkai yang sangat berkaitan erat yaitu proses seleksi dan menonjolkan aspek dari realita (Eriyanto.2002). Penekanan ini akan menggambarkan koran tersebut dalam melakukan pembingkai terhadap legitimasi atau delegitimasi aktor. Bentuk penonjolan sangat beragam, biasanya menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol daripada informasi lain dengan menempatkan di headline depan atau belakang, grafis yang mencolok agar menarik pembaca, dan generalisasi agar masyarakat menyatukan persepsi (Fahmi.2016). Perangkat dalam konsep Pembingkai Entman merujuk pada pemberian definisi dengan *Problem Identification*, penjelasan dengan *Causal Interpretation*, evaluasi (*moral judgement*), dan rekomendasi (*treatment recommendation*) dalam kerangka berpikirnya.

Definisi diartikan untuk mendefinisikan sebuah masalah yang diangkat. Elemen ini menjadi titik awal pembaca memahami isi berita. Ini adalah bingkai utama yang bisa menekankan pembingkai yang akan dibahas. Penjelasan ialah memperkirakan sumber masalah atau aktor yang menjadi penyebabnya. Evaluasi berarti membuat sebuah keputusan secara moral untuk melegitimasi

atau mendelegitimasi. Biasanya akan dimasukan argumentasi wartawan yang mendukung dari pembingkaiian tersebut. Dan rekomendasi menekankan pada resolusinya, seperti apa penyelesaian yang ditawarkan dan untuk mengatasi masalah tersebut.

Menganalisis dari konsep tersebut artinya akan ada integrasi antara aspek politik dengan berita yang beredar untuk dibingkai dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat akan tersegmentasi dengan informasi yang diberikan oleh koran-koran yang pada saat itu menjadi sumber informasi paling kuat dan banyak diminati. Maka, koran akan selalu menjadi alat legitimasi setiap rezim yang akan berkembang dan melakukan delegitimasi terhadap rezim sebelumnya. Berdasarkan dua landasan teori tersebut diantaranya teori pembingkaiian pers dan teori delegitimasi, peneliti akan menganalisis beberapa koran yang terbit secara rutin di tahun 1966 sampai 1970. Hal ini untuk merekonstruksi proses deSoekarnoisasi dan membedah secara holistik konten koran tersebut.

E. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam bentuk deskriptif-analisis dengan mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dengan penelitian sejarah. Penelitian akan menggunakan pendekatan dua ilmu yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah penelitian ini diantaranya :

- a. Pemilihan topik

Pemilihan topik merupakan dasar pertama yang dilakukan dengan mengedepankan pendekatan emosional dan intelektual (Kuntowijoyo.1995). Tahap ini mengarahkan peneliti untuk memilih topik DeSoekarnoisasi, karena sangat menarik untuk dibahas dan dikaji. Topik ini kurang dipahami oleh khalayak awam dan kurang banyak referensi dalam mempelajarinya. Sehingga peneliti membuat topik ini agar menjadi penelitian yang bisa dilanjutkan agar nantinya perefrensi mengenai DeSoekarnoisasi lebih masif di masyarakat.

b. Heuristik

Heuristik atau dikenal dengan pengumpulan sumber atau data untuk mendukung topik yang sedang diteliti. Sumber yang dikumpulkan oleh peneliti ialah surat-surat kabar pada masa Orde Baru mulai 1966 sampai 1970 yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Serta buku-buku yang terbit atau membahas mengenai proses delegitimasi Presiden Soekarno dan ajarannya yang diantaranya : “Dwifungsi Abri”, “Pejuang Prajurit”, “30 Tahun Indonesia Merdeka”, “Naskah Pancasila Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik”, dan “Pendidikan Politik Bangsa.

c. Verifikasi

Setelah berhasil mengumpulkan beberapa sumber oleh peneliti, langkah selanjutnya ialah mengkritisi sumber tersebut. Menurut Kuntowijoyo, verifikasi terbagi atas dua acara yaitu eksternal dan internal. Kritik sumber pertama dilakukan melalui eksternal yaitu dengan melihat dari bentuk fisiknya serta kertas, gaya tulisan, bahasa, kalimat, dan

tampilan dari sumber yang didapat. Karena sumber yang digunakan ialah buku dan koran maka verifikasi akan melihat kelayakan dari wujud kertas dan tulisan yang masih terbaca atau tidak. Sebagai contoh, sumber yang digunakan koran Sinar Harapan, maka dalam pengkajiannya menggunakan *mikrofilm* untuk dapat membaca koran-koran terbitan tahun yang diteliti.

Sedangkan, ketika kritik eksternal telah dianggap layak maka lanjut kepada kritik internal yaitu mempertimbangkan dan menganalisis substansi dari sumber yang telah ditemukan. Serta mempertimbangkan penerbit berita tersebut dengan menelisik latar belakang biografinya. Uji otentisitas juga memperhatikan sumber tersebut dibuat kapan, dimana, dan bahan apa sumber itu dibuat. Dan uji kredibilitas dilakukan dengan membandingkan sumber satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, akan dibandingkan koran Sinar Harapan dengan Gelora Indonesia apakah keduanya memiliki pembingkaiannya yang sama atau berbeda namun dengan substansi yang selinear.

d. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran atas sumber yang sudah dianggap layak dengan mengintegrasikannya pada topik penelitian yang dibahas. Namun tetap mengikuti kaidah keilmuan agar mencegah terjadinya subjektivitas yang berlebihan.

Interpretasi terdapat analisis dan sintesis. Analisis ialah cara untuk menguraikan permasalahan yang lebih mendalam dan secara holistik.

Sedangkan sintesis mengarahkan penelitian ini untuk membentuk sebuah konklusi dalam membahas topik yang dibahas.

Interpretasi dalam skripsi ini ialah menafsirkan fakta-fakta dari beberapa pers dan dianalisis bentuk delegitimasi politik terhadap Presiden Soekarno serta Orde Lama.

e. Historiografi

Tahapan terakhir ialah historiografi yang berarti penulisan sejarah. Penelitian ini akan direpresentasikan melalui struktur penulisan yang sesuai. Penelitian dalam bentuk ini akan dipaparkan menjadi tiga bagian yaitu pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dalam penelitian ini, hal yang ditekankan ialah alur kronologis sesuai waktu yang telah dipilih. Selain itu, penelitian juga akan sesuai dengan kaidah yang berlaku agar berguna untuk kalangan umum.

2. Sumber Penelitian

Sumber yang digunakan akan dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen dan arsip. Sedangkan sumber sekunder memuat berita-berita yang dikeluarkan masa Orde Baru seperti Sinar Harapan, Gelora Indonesia, Kompas, dan Berita Yuda dan beberapa buku-buku yang beredar pada masa Orde Baru diantaranya “Dwifungsi Abri”, “Pejuang Prajurit”, “30 Tahun Indonesia Merdeka”, “Naskah Pancasila Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik”, dan “Pendidikan Politik Bangsa”.